

Efektivitas Pengungkapan Anti-Korupsi dalam Meminimalkan Manajemen Laba

Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
Email: putri.dwi.aprilia.febis@upnjatim.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v8i2.400>

Diterima: Agustus 2025

Direvisi: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

ABSTRACT

This research examines the connection between earnings management practices in financial reporting and the magnitude of corporate transparency regarding anti-corruption disclosure. Manipulation of financial information is frequently employed by firms as a strategic tool to portray enhanced performance. Nevertheless, transparent anti-corruption measures are posited to strengthen corporate accountability and foster more ethical financial conduct. The research sample comprises 349 firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the period 2021–2023. Anti-corruption disclosure data were collected through content analysis of annual reports, while financial data were derived from publicly accessible financial statements. Utilizing a quantitative research design, this study looks at the influence of corporate openness to anti-corruption policies on the propensity to control earnings. According to the empirical results, businesses demonstrating explicit commitments to anti-corruption initiatives tend to exhibit lower levels of financial reporting manipulation. This relationship is particularly evident among smaller firms and those exhibiting strong financial performance. These findings underscore the importance of ethical values and transparency in promoting the reliability and credibility of financial reporting

Keywords: Anti-corruption disclosure, earnings management, profitability, leverage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan praktik manajemen laba dalam penyusunan laporan keuangan dengan tingkat keterbukaan perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi. Manipulasi informasi keuangan sering kali dijadikan strategi oleh perusahaan guna menciptakan kesan kinerja yang lebih baik. Namun, pengungkapan anti-korupsi secara transparan diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas serta mendorong perilaku keuangan yang lebih etis. Sampel dalam penelitian ini mencakup 349 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Data mengenai pengungkapan anti-korupsi diperoleh melalui analisis isi laporan tahunan, sementara informasi keuangan dikumpulkan dari laporan keuangan yang tersedia untuk publik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menguji sejauh mana keterbukaan perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi memengaruhi kecenderungan mereka dalam melakukan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara eksplisit menunjukkan komitmen terhadap pengungkapan anti-korupsi cenderung memiliki tingkat manipulasi laporan keuangan yang lebih rendah. Temuan ini lebih signifikan pada perusahaan berskala kecil dan pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya nilai etika dan prinsip transparansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal dan kredibel.

Kata kunci: pengungkapan anti-korupsi, manajemen laba, profitabilitas, ukuran perusahaan.

Khasanah, P.D.A.N. (2025). Efektivitas Pengungkapan Anti-Korupsi dalam Meminimalkan Manajemen Laba. BAJ: Behavioral Accounting Journal, 8(2), 105-120. <https://doi.org/10.33005/baj.v8i2.400>

PENDAHULUAN

Manajemen laba terjadi dalam situasi manajemen dan pemegang saham mengalami perbedaan kepentingan, di mana laporan keuangan dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan pribadi manajer (Cug & Cugova, 2021; Khasanah & Kusuma, 2020), mengubah atau memanipulasi laporan keuangan (Healy & Serafeim, 2011; Khasanah & Kusuma, 2020), menurunkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan, meningkatkan unsur bias dalam penyajiannya, serta menyebabkan gangguan dan kerugian bagi para pengguna informasi keuangan tersebut (Adejumo & Ogburie, 2025). Manajemen laba muncul sebagai hasil dari dorongan internal yang menyimpang, dimana tindakan tersebut dilandasi oleh kepentingan dan motivasi pribadi individu (Maulidi & Ali, 2025), praktiknya manajer cenderung mengubah angka-angka yang ditemukan dalam laporan keuangan untuk memenuhi tujuan tertentu meskipun hal tersebut dapat mengabaikan atau merugikan kepentingan pihak lain. Manajemen laba bertujuan untuk menyesatkan dan merugikan pemakai atau pengguna laporan keuangan tetapi menguntungkan manajer atau perusahaan. Berdasarkan paragraf 16 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), informasi disusun untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna secara umum, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau keinginan pihak tertentu, serta tidak boleh disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu saja (IAI, 2019).

Pikiran yang telah tercemari oleh niat tidak baik sering kali sulit dikenali dari tindakan lahiriah seseorang, namun dapat lebih mudah dikenali melalui motivasi dan kepentingan yang melatarbelakangi tindakannya. Hal ini disebabkan karena perilaku menyimpang tidak selalu berangkat dari niat buruk yang tampak jelas, dan sering kali tidak dapat sepenuhnya dijangkau atau diantisipasi oleh aturan hukum tertulis. Akibatnya, banyak individu melakukan tindakan yang merugikan dengan cara-cara yang tampak sah atau dibungkus oleh pernyataan yang seolah tidak melanggar hukum (Khasanah & Kusuma, 2020; Ratu & Rahajeng, 2024). Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan sumber daya organisasi oleh individu untuk keuntungan pribadi, yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial oleh Masyarakat (Karim, Animah, & Sasanti, 2017; Khasanah & Kusuma, 2020; Lange, 2008; Doh et al., 2003), akibat negatif yang terjadi apabila perusahaan melakukan korupsi yaitu hilangnya kepercayaan dari investor, menurunkan pangsa pasar, serta dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial dan menurunkan kinerja pada perusahaan (Khasanah & Kusuma, 2020; Osuji, 2011). Untuk meminimalkan potensi risiko yang merugikan, perusahaan

membangun kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab sosial di bidang anti-korupsi melalui laporan tahunan mereka.

Pengungkapan anti-korupsi tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, pengungkapan ini turut berperan dalam meningkatkan kesadaran publik sekaligus mendorong perusahaan untuk mengadopsi nilai-nilai anti-korupsi dalam operasionalnya. Melalui pengungkapan tersebut, perusahaan dapat mengembangkan kapasitas dan kompetensi internal dalam merancang serta menjalankan program-program anti-korupsi secara lebih aktif dan efektif (Bappenas, 2024). Keterlibatan perusahaan dalam tindakan korupsi yang tercatat dalam bursa maupun tidak tercatat di bursa sangat berbeda dalam pemahaman persoalannya. Persoalan pada perusahaan yang terlibat dalam bursa lebih rumit apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terlibat di dalam bursa. Perusahaan yang tidak terlibat dalam bursa persoalan hanya muncul pada individu maupun perseorangan saja, tetapi perusahaan yang terlibat di dalam bursa akan melibatkan individu atau perseorangan, efek dari investor, rekanan bisnis maupun masa depan perusahaan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyalahgunakan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) dengan membayar vendor palsu dengan dokumen pendukung palsu. Korupsi ini berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun (Kurniawan, 2023). Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, sejumlah perusahaan telah melakukan aktivitas impor terhadap besi dan berbagai produk turunannya. Kejaksaan Agung menetapkan mereka sebagai tersangka korupsi dalam kasus sujel impor tanpa izin yang menyebabkan kerugian industri nasional dan persaingan negatif terhadap produk lokal (Medistiara 2022). Ketika kasus korupsi muncul, Indonesia kerap menjadi sorotan internasional terkait isu korupsi. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), Indonesia tergolong sebagai negara anggota ASEAN yang menunjukkan upaya pembatasan korupsi melalui penerapan sistem hukum yang relatif ketat serta regulasi yang dirancang pemerintah untuk menekan praktik koruptif. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami perubahan, yaitu meningkat pada tahun 2021 dengan skor 38 dari 100 (peringkat 96 dari 180 negara), namun menurun menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023, dengan peringkat turun ke posisi 110 dari 180 negara.

Pengungkapan anti-korupsi perusahaan dapat membantu membangun bisnis, bukan hanya karena perusahaan publik memiliki sistem pencegahan korupsi, tetapi juga karena mereka dapat mencerminkan tindakan bermoral dari pembisnis yang mengakibatkan terciptanya pasar

bisnis yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan teori citra, teori yang biasa digunakan untuk menciptakan pasar usaha yang adil. Menurut teori citra, perusahaan yang melaporkan pengungkapan korupsi tidak hanya berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders; citra, reputasi, dan nilai positif dari pemangku kepentingan juga diupayakan untuk meningkatkan kepercayaan mereka dalam jangka panjang. Mengacu pada uraian di atas serta pentingnya peran tanggung jawab perusahaan dalam aspek anti-korupsi, penulis tertarik untuk meneliti hubungan pengungkapan anti-korupsi dan manajemen laba di pasar modal Indonesia.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori legitimasi

Menurut teori legitimasi, agar perusahaan dapat bertahan, mereka harus mendapatkan penerimaan dari Masyarakat. Ini merupakan komponen dari hubungan timbal balik yang dimiliki perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, antara lain, untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Menurut Olateju & Adaoye (2022), tindakan ini bertujuan untuk membangun persepsi positif masyarakat terhadap bisnis, yang pada akhirnya dapat mendukung keberlangsungan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kegiatan sosialnya mungkin akan diterima oleh *stakeholders*, karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menunjukkan kepatuhan dan transparansi pada perusahaan. Perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosial dengan mengungkapkan anti korupsi, yang dapat digunakan untuk menilai dan mencegah risiko suap (O'Brien, Hill & Autry, 2009; Transparency Internasional, 2019).

Teori citra

Menurut Jefkin (1987), citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak seseorang sebagai hasil dari penilaian terhadap informasi yang dapat dipahami, diingat, dan diorganisir secara mental. Citra berperan sebagai aset tak berwujud yang mencerminkan reputasi, nilai-nilai positif, serta tingkat kepercayaan terhadap suatu perusahaan. Reputasi perusahaan sangat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan selama proses pencapaian tujuan organisasi. Akibatnya, pemangku kepentingan sering menggunakan reputasi perusahaan sebagai acuan utama dalam menetapkan kebijakan atau tindakan.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah pendekatan yang bersifat positif dan lebih menitikberatkan pada penelitian yang bersifat empiris (Watt & Zimmerman, 1986). Mereka juga mengulas berbagai metode akuntansi yang umum digunakan dalam pengembangan teori akuntansi. Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yang dianggap menguntungkan, yaitu: (1) Hipotesis rencana bonus, bahwa manajer perusahaan cenderung memodifikasi laba yang dilaporkan demi memenuhi ketentuan dalam rencana bonus; (2) Hipotesis kontrak utang, yang menjelaskan bahwa perubahan laba dilakukan manajer karena terikat oleh kontrak utang; dan (3) Hipotesis biaya politik, yang mengemukakan bahwa manajer mengubah laba yang dilaporkan untuk menghindari tekanan akibat kebijakan atau beban politik.

Pengungkapan Anti-korupsi dan Manajemen Laba

Anti-korupsi yang diungkapkan dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat maupun *stakeholders*. Pengungkapan yang dilaporkan perusahaan dapat digunakan untuk menjamin agar perusahaan bertahan hidup lebih lama karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapan anti-korupsi oleh perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam aspek pemberantasan korupsi, yang disampaikan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap isu korupsi serta komitmennya terhadap penegakan hukum guna menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan yang melakukan pengungkapan anti korupsi berpotensi mencerminkan kinerja keuangan yang positif serta cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba (Githaiga, 2025; Karim et al., 2017; Khasanah & Kusuma, 2020)

H1 : Pengungkapan anti-korupsi berhubungan negatif terhadap manajemen laba

METODE PENELITIAN

Fokus pengujian ini adalah industri pengolahan atau industri pabrikan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Untuk memenuhi tujuan penelitian, metode purposive sampling digunakan. Kriteria pemilihan sampel meliputi: (a) perusahaan industri pengolahan atau industri pabrikan yang terdaftar di BEI dari tahun 2021 hingga 2023; (b) perusahaan yang secara konsisten menyajikan laporan keuangan dan tahunan selama periode penelitian; dan (c) ketersediaan data yang diperlukan untuk analisis.

Definisi operasional variabel

1. Pengungkapan Anti-korupsi Perusahaan

Penelitian ini peran dari pengungkapan anti-korupsi adalah sebagai variabel independen yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas perusahaan dalam mengelola dan mencegah praktik korupsi (Karim et al., 2017; Khamainy & Laras Asih, 2019; Ghazwani et al., 2025). Transparansi dalam pengungkapan kebijakan anti-korupsi berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan internal maupun eksternal perusahaan, sehingga upaya pencegahan korupsi juga menggambarkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan (Hess, 2009; Khasanah & Wijaya, 2020; Ghazwani et al., 2025). Tingkat pengungkapan anti-korupsi perusahaan diidentifikasi melalui penilaian indeks anti-korupsi yang didasarkan pada standar dari *Global Reporting Initiative* (GRI). Informasi anti korupsi dalam gri *standards* tersebut masuk ke dalam sub-kategori masyarakat dengan aspek anti-korupsi yang terdiri dari 3 indikator, yaitu;

- (a) 205-1: aktivitas-aktivitas yang dianggap memiliki potensi risiko korupsi, mencakup dua jenis informasi yang harus diungkapkan.
- (b) 205-2: penyampaian informasi dan pelatihan terkait kebijakan serta prosedur anti-korupsi, terdiri atas lima poin pengungkapan.
- (c) 205-3: kasus korupsi yang telah terbukti beserta langkah-langkah penanganannya, mencakup empat poin pengungkapan.

Indeks pengungkapan anti-korupsi dihitung dengan menghitung proporsi antara jumlah item pengungkapan yang diinformasikan oleh perusahaan terhadap total item pengungkapan yang harus disampaikan. Perusahaan akan diberikan skor '1' jika mengungkapkan informasi sesuai dengan poin-poin dalam GRI Standards, dan skor '0' jika tidak mengungkapkan informasi tersebut (Haniffa & Cooke, 2005; Khasanah & Kusuma, 2020).

2. Manajemen laba

Konflik kepentingan yang ada antara manajer dan pemegang saham dalam pelaporan keuangan demi memperoleh keuntungan pribadi adalah dasar manajemen laba (Schipper, 1998). Modified Jones Model, yang dikembangkan oleh Dechow et al. (2012), digunakan untuk menilai manajemen laba. Metode yang digunakan untuk menghitung manajemen laba, yaitu;

- (i) Total akrual dihitung dengan cara mengurangi kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional pada tahun ke-t dari keuntungan bersih pada tahun sebelumnya yang sama. Perhitungan ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TAK_{it} = LBit - AKO_{it}$$

Adapun penentuan koefisien dari regresi total akrual dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

$$TAK_{it}/AK_{it-1} = \alpha_1 (1/AK_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta PEN_{it}/AK_{it-1}) + \alpha_3 (PP\&E_{it}/AK_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

(ii) Melakukan perhitungan terhadap akrual non-diskresioner dengan perhitungan berikut ini:

$$AND_{it} = \alpha_1 (1/AK_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta PEN_{it}/AK_{it-1} - \Delta PIU_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PP\&E_{it}/AK_{it-1})$$

(iii) Akrual diskresioner (AKD) dapat digunakan sebagai indikator manajemen laba yang perhitungannya dilakukan dengan rumus berikut:

$$AKD_{it} = (TAK_{it}/AK_{it-1}) - AND_{it}$$

Keterangan:

- AKD_{it} = nilai akrual diskresioner yang dimiliki oleh perusahaan ke-i pada tahun ke-t
- AND_{it} = mengacu pada besaran akrual non-diskresioner yang tercatat pada perusahaan ke-i di tahun ke-t.
- TAK_{it} = jumlah akrual perusahaan ke-i pada tahun ke-t
- A_{it} = akrual perusahaan ke-i pada tahun ke-t
- $LBit$ = jumlah akrual yang dimiliki oleh perusahaan ke- i pada tahun ke-t
- AKO_{it} = kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan ke-i pada tahun ke-t
- ΔPEN_{it} = Selisih antara pendapatan perusahaan ke-i pada tahun ke-t dengan pendapatan pada tahun sebelumnya (tahun t-1)
- ΔPIU_{it} = Perbedaan jumlah piutang bersih perusahaan ke-i antara tahun ke-t dan tahun sebelumnya (t-1)
- $PP\&E_{it}$ = Jumlah keseluruhan properti, pabrik, dan peralatan (aset tetap) perusahaan i pada tahun t.

Variabel Kontrol

Variabel ukuran perusahaan (SIZE), *Leverage* (LEV) dan profitabilitas (PROB) merupakan kontrol yang digunakan dalam pengujian ini. Profitabilitas dapat dihitung dengan menghitung rasio antara laba bersih perusahaan dan jumlah aset yang dimilikinya (Alabdulkarim, Kalyanaraman, & Alhussayen, 2024). Logaritma natural digunakan untuk menghitung ukuran bisnis dari total aset digunakan. Di sisi lain, leverage dihitung dengan menghitung total utang dan aset perusahaan (Dina & Wahyuningtyas, 2022).

Pengujian Hipotesis

Studi ini dilakukan untuk memeriksa hipotesis tentang bagaimana praktik manajemen laba dan tingkat pengungkapan anti-korupsi berhubungan satu sama lain. Adapun analisis regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$ML_{it} = \alpha + \beta_1 PAK_{it} + \beta_2 PROB_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 LEV_{it} + year\ effect + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

ML_{it}	= manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan i pada tahun t .
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
PAK_{it}	= Tingkat pengungkapan anti-korupsi yang dilakukan oleh perusahaan i pada tahun t
$PROB_{it}$	= Besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan i pada tahun t
$SIZE_{it}$	= Ukuran perusahaan ke- i pada tahun/periode t
LEV_{it}	= Proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan pada tahun t
ε_{it}	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan industri pengolahan atau industri pabrikan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2023. Metode pengambilan sampel purposive, yang didasarkan pada pertimbangan atau standar tertentu, digunakan untuk pemilihan sampel. Proses rinci terkait pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pemilihan sampel

Keterangan	2021-2023
Perusahaan sektor industri pengolahan atau industri pabrikan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)	657
Perusahaan sektor industri pengolahan atau industri pabrikan yang mempunyai data lengkap	576
Data Outlier (Eliminasi)	(227)
Data Akhir	349

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Median	Std. Dev
ML_{it}	-0,1343	0,1043	-0,0150	-0,0350	0,1193
PAK_{it}	0,0202	0,5553	0,2878	0,2887	0,2676
$PROB_{it}$	-0,0389	0,1343	0,0477	0,0377	0,0866
$SIZE_{it}$	25,8771	33,5751	29,7261	29,6461	1,8490
LEV_{it}	0,0214	0,9160	0,4687	0,4687	0,6324
Jumlah Sampel	349				

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan data mengenai skor pengungkapan anti-korupsi (PAK), di mana nilai rata-rata yang diperoleh 0,2878 dan standar deviasi 0,2676. Nilai maksimum tercatat sebesar

0,5553, sedangkan nilai minimum adalah 0,0202. Untuk nilai manajemen laba (ML) rata-rata nilai yang diperoleh adalah -0,0150 dengan deviasi standar sebesar 0,1193, sedangkan nilai tertingginya mencapai 0,1043 dan nilai terendah tercatat sebesar -0,1343. Dalam studi ini, nilai rata-rata PROB menunjukkan angka positif sebesar 0,0477 atau 4,77%, yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel tergolong menguntungkan (*profitable*). Nilai maksimum ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 33,5751 dan minimum 25,8771, dengan selisih sebesar 7,698. Ketika ukuran pada perusahaan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 3,849 per kategori, maka perusahaan kecil berada dalam kisaran 25,8771 hingga 29,7261, sedangkan perusahaan besar berkisar antara 29,7261 hingga 33,5751. Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata sampel dalam penelitian ini termasuk dalam kategori perusahaan kecil dengan rentang ukuran 25,8771–29,7261.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	B	T-stat	Sig
<i>PAKit</i>	-0,065	-2,511	0,012**
<i>PROBit</i>	0,438	4,885	0,000***
<i>SIZEit</i>	-0,020	-1,972	0,067
<i>LEVit</i>	0,082	3,956	0,000***
<i>Tahun_1</i>	0,026	2,315	0,021**
<i>Tahun_2</i>	0,019	2,003	0,146
<i>Cons</i>	-0,031	-0,614	0,539
<i>N</i>	349		
<i>R square (r²)</i>	0,237		

Catatan: **signifikansi pada $\alpha = 5\%$; dan *** $\alpha = 1\%$

Sumber: Data diolah (2025)

Pengungkapan Anti-Korupsi dan Manajemen Laba

Studi ini menyelidiki hubungan antara pengungkapan anti-korupsi dan praktik manajemen laba. Hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *PAKit* memiliki koefisien signifikansi negatif dan tingkat signifikansi 0,012, di bawah ambang signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan anti-korupsi secara signifikan berdampak pada manajemen laba, mendukung hipotesis pertama (H1).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas cenderung menyampaikan informasi terkait tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan dari masyarakat serta para pemangku

kepentingan (Gray, Owen, & Maunders, 1988; Khasanah & Kusuma, 2020). Tindakan pengungkapan anti-korupsi dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menunjukkan keseriusannya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, pengungkapan ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan internal dan eksternal perusahaan (Hess, 2009). Lebih lanjut, perusahaan dapat memanfaatkan pengungkapan program anti-korupsi sebagai sarana untuk membuktikan transparansi serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perilaku antikorupsi. Komitmen terhadap program tersebut mencerminkan tanggung jawab perusahaan atas perilaku karyawannya, serta pengakuan terhadap potensi dampak negatif yang dapat muncul akibat keterlibatan dalam tindakan korupsi. Hal ini dapat memengaruhi reputasi, integritas, dan legitimasi perusahaan (Joseph et al., 2016; Khasanah & Putri, 2020; Ratu & Rahajeng, 2024)

Tabel 3 menunjukkan signifikansi positif untuk variabel profitabilitas sebesar 0,000. Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi positif khususnya hipotesis bonus. Dalam hal ini, manajer diduga memilih pendekatan akuntansi khusus untuk memodifikasi laba demi memperoleh kompensasi yang lebih besar. Semakin besar nilai yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan manajer terlibat dalam praktik manajemen laba. Selain itu, Tabel 3 juga mencatat hasil signifikansi positif pada variabel leverage dengan nilai 0,000. Temuan ini mendukung hipotesis kontrak utang dalam teori akuntansi positif bahwa perusahaan menentukan metode akuntansi berdasarkan perjanjian pinjaman yang dimilikinya. Besarnya nilai leverage perusahaan, maka akan menyebabkan tingginya risiko utang yang dihadapi oleh investor. Dengan demikian, perusahaan lebih cenderung menggunakan strategi manajemen laba untuk meningkatkan laba yang disajikan, sebagai strategi untuk mengurangi risiko keuangan

Tabel 4. Profitabilitas (PROB)

Variabel	Profitabilitas positif Prob > 0,000			Profitabilitas negatif Prob < 0,000		
	B	T-stat	Sig	B	T-stat	Sig
<i>PAK_{it}</i>	-0,065	-2,820	0,005***	0,045	0,045	0,265
<i>SIZE_{it}</i>	0,018	2,135	0,575	-0,002	-0,002	0,816
<i>LEV_{it}</i>	0,091	4,025	0,000***	0,034	0,034	0,164
<i>Tahun_1</i>	0,022	2,055	0,041**	0,014	0,014	0,595
<i>Tahun_2</i>	0,011	1,745	0,182	-0,006	-0,006	0,833
<i>Konstanta</i>	-0,058	-0,998	0,319	0,012	0,012	0,915
<i>N</i>	305			44		
<i>R square (r²)</i>	0,176			0,052		

Catatan: **signifikansi pada $\alpha = 5\%$; dan *** $\alpha = 1\%$; Sumber: Data diolah (2025)

Penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4, menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas (PROB) positif dan tingkat pengungkapan anti-korupsi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam melakukan tindakan manajemen laba dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas negatif. Nilai signifikansi variabel PAKit pada perusahaan dengan profitabilitas positif sebesar $0,005 < 0,05$ menunjukkan hal ini, yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, sementara nilai signifikansi pada profitabilitas negatif sebesar $0,265 > 0,05$, yang menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bisnis yang memperoleh laba—atau profitabilitas positif—tidak terdorong untuk menerapkan manajemen laba. Ini karena fakta bahwa bisnis tersebut lebih memilih menjaga reputasi dan akuntabilitasnya di hadapan pemangku kepentingan (Perwitasari, 2014; Khasanah & Wijaya, 2020). Ini sejalan dengan teori legitimasi yang mengatakan bahwa Perusahaan dengan citra, reputasi, dan nilai positif akan berupaya mendapatkan kepercayaan publik guna mempertahankan legitimasi sosialnya. Akibatnya, perusahaan tersebut memiliki keyakinan lebih untuk menghasilkan laba berkualitas dan menghindari praktik manajemen laba.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas negatif cenderung menggunakan pengungkapan informasi anti-korupsi sebagai strategi simbolik dalam mengelola persepsi publik, sekaligus sebagai alat untuk menyamarkan praktik manajemen laba. Dengan demikian, pengungkapan ini digunakan sebagai bentuk pencitraan untuk membangun kepercayaan dan reputasi, meskipun kondisi keuangan perusahaan tidak menunjukkan kinerja yang kuat. Temuan ini konsisten dengan teori citra, yang menekankan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan strategis untuk membentuk persepsi positif dari para pemangku kepentingan. Ketika perusahaan berhasil membentuk citra dan reputasi yang kuat, maka kepercayaan dari stakeholder akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengalihkan perhatian publik dari potensi praktik manipulatif yang tersembunyi (Khasanah & Kusuma, 2020)

Tabel 5 menunjukkan bahwa perusahaan berskala kecil dengan tingginya pengungkapan anti korupsi cenderung menunjukkan kemampuan manajemen laba yang lebih kecil daripada perusahaan berskala besar. Nilai signifikansi variabel PAKit pada kelompok perusahaan kecil adalah 0,040, di bawah batas 0,05. Hasil menunjukkan pengungkapan anti-korupsi berperan signifikan dalam mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan kecil, tetapi nilai signifikansi sebesar 0,187 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dampaknya tidak signifikan pada perusahaan berskala besar. Hasil ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang diusulkan Watts & Zimmerman (1986). Teori ini mengatakan bahwa mekanisme pengungkapan anti-korupsi dapat

mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan kecil, kecenderungan perusahaan kecil untuk memiliki standar kinerja yang lebih rendah serta penyampaian informasi yang lebih sederhana kepada para pemangku kepentingan. Karena itu, mereka cenderung tidak terdorong untuk menghasilkan laba berlebihan atau menghindari biaya politik yang tinggi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan pengungkapan anti-korupsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk memperkuat legitimasi di mata publik.

Tabel 5. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Variabel	Ukuran perusahaan besar size > 29,726			Ukuran perusahaan kecil size < 29,726		
	B	T-stat	Sig	B	T-stat	Sig
<i>PAKit</i>	-0,058	-2,214	0,187	-0,089	-3,015	0,040**
<i>Probit</i>	0,572	4,762	0,000***	0,498	4,322	0,000***
<i>Levit</i>	0,129	3,922	0,001***	0,083	3,305	0,001***
<i>Tahun_1</i>	0,013	1,985	0,049	0,027	2,844	0,039**
<i>Tahun_2</i>	-0,003	-0,543	0,588	0,005	0,748	0,456
<i>Konstanta</i>	-0,102		0,000	-0,087	-4,712	-0,078
<i>N</i>		152			197	
<i>R square (r²)</i>		0,192			0,146	

Catatan: **signifikansi pada $\alpha = 5\%$; dan *** $\alpha = 1\%$

Sebaliknya, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh perusahaan berskala besar. Meskipun mereka melakukan pengungkapan anti-korupsi, hasil menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap penurunan manajemen laba tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa pengungkapan tersebut justru digunakan sebagai alat untuk membentuk citra dan menyamarkan perilaku oportunistik. Hasil ini konsisten dengan teori Citra (Khasanah & Kusuma, 2020), bahwa perusahaan berskala besar cenderung lebih berupaya menjaga reputasi serta membangun persepsi positif guna memperoleh legitimasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Mereka menampilkan diri sebagai entitas yang transparan dan dapat dipercaya dalam jangka panjang, namun di sisi lain, justru memanfaatkan pengungkapan sosial seperti anti-korupsi sebagai strategi untuk menyembunyikan praktik manajemen laba yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berperan dalam menentukan pendekatan terhadap pengungkapan anti-korupsi: perusahaan berskala kecil cenderung menerapkannya sebagai contoh nyata tanggung jawab sosial, sedangkan perusahaan berskala besar lebih menjadikannya sebagai alat simbolis dan strategi untuk menyamarkan kepentingan manajerial tertentu

SIMPULAN

Studi ini menyelidiki hubungan antara pengungkapan anti-korupsi dan tindakan manajemen laba perusahaan. Sebanyak 349 observasi dijadikan sebagai sampel penelitian dari tahun 2021-2023. Pengungkapan anti-korupsi dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi mereka serta meningkatkan kesadaran publik tentang penerapan kebijakan anti-korupsi. Hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan hubungan negatif antara pengungkapan anti-korupsi dan manajemen laba. Semakin banyak tindakan anti-korupsi yang diungkapkan perusahaan, semakin sedikit kecenderungan untuk menggunakan manajemen laba. Ketika perusahaan menunjukkan profitabilitas yang baik dan berukuran kecil, temuan ini semakin jelas. Selain itu, penelitian ini menemukan temuan yang signifikan terkait dengan variabel leverage dan profitabilitas. Hipotesis rencana bonus dan hipotesis kontrak selaras dengan teori akuntansi positif.

Untuk memperkaya pemahaman hubungan antara pengungkapan anti-korupsi dan manajemen laba, riset berikutnya disarankan: (i) membedakan proksi manajemen laba akrual dan riil serta menguji peran kualitas audit sebagai pemoderasi—temuan awal menunjukkan kualitas audit dapat menekan praktik oportunistik ketika kualitas pengungkapan anti-korupsi tinggi (Salem et al., 2023); (ii) mengevaluasi efek keberagaman gender pada komite audit/dewan sebagai faktor tata kelola yang memoderasi pengaruh pengungkapan anti-korupsi terhadap manajemen laba (Githaiga et al., 2024); (iii) memasukkan instrumen tata kelola integritas lain seperti efektivitas sistem whistleblowing dan kanal pelaporan sebagai variabel penjelas tambahan, karena pengungkapan dan praktik pelaporan dugaan kecurangan terbukti berkaitan dengan penurunan manajemen laba (Belgacem et al., 2025); serta (iv) menguji keterkaitan kebijakan pencegahan korupsi perusahaan dengan perilaku oportunistik lain—misalnya penghindaran pajak—untuk menilai trade-off atau komplementaritas kebijakan integritas (Sarhan et al., 2024). Selain itu, studi lintas-negara atau lintas-regulasi (mis. adopsi standar anti-penyuapan/ABAC) dengan desain kausal (DiD/GMM) dan text-mining atas laporan berkelanjutan dapat memberikan bukti eksternalitas dan memperkuat generalisasi (Elmaghrabi & Diab, 2023).

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Selain memperkaya literatur, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk studi mendatang mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, khususnya yang berkaitan dengan aspek anti-korupsi dan kaitannya dengan praktik manajemen laba. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi investor dalam mempertimbangkan pilihan bisnis yang menunjukkan tingkat pengungkapan anti korupsi yang tinggi, karena hal tersebut berpotensi menurunkan praktik manajemen laba di perusahaan. Dari

sisi regulasi, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan oleh regulator terkait tanggung jawab sosial, khususnya yang berkaitan dengan aspek anti korupsi pada perusahaan publik maupun non publik, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adejumo, A. P., & Ogburie, C. P. (2025). Forensic accounting in financial fraud detection: Trends and challenges. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(3), 1219-1232. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063991>
- Alabdulkarim, N., Kalyanaraman, L., & Alhussayen, H. (2024). The Impact of Firm Size on The Relationship Between Leverage and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1664. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04211-x>
- Bappenas. (2024). Laporan rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Anti Korupsi. Diunduh: 14 Agustus 2025. www.bappenas.co.id
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2020 Meningkat Dibandingkan IPAK 2019. Diunduh: 14 Agustus 2025. www.bps.go.id.
- Belgacem, I. (2025). Whistleblowing Disclosure as a Shield Against Earnings Management: Evidence from the Insurance Sector. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(2), 65.
- Cug, J., & Cugova, A. (2021). Relationship between Earnings Management and Earnings Quality in the Globalized Business Environment. *SHS Web of Conferences*, 92, 02011. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202011>
- Dechow, P. M. et al. (2012). Detecting Earnings Management: A New Approach. *Journal of Accounting Research*, 50 (2), 275-334. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00449.x>
- Dina, D. A. S., & Wahyuningtyas, E. T. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Accounting and Management Journal*, 6(1), 36–49. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2821>
- Elmaghrabi, M. E., & Diab, A. (2024). Anti-corruption corporate disclosures and earnings management: evidence from a developed market. *Journal of Financial Crime*, 31(6), 1302-1319.
- Ghazwani, M., Alamir, I., Salem, R. I. A., & Sawan, N. (2024). Anti-corruption disclosure and corporate governance mechanisms: insights from FTSE 100. *International Journal of Accounting & Information Management*, 32(2), 279-307.
- Githaiga, P. N. (2025). Corporate Anticorruption Disclosure and Earnings Management: The Moderating Role of Board Gender Diversity. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 25(3), 684–703. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2024-0100>
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. (1988). Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1), 6–20. <https://doi.org/10.1108/EUM00000000004617>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>

- Healy, P., & Serafeim, G. (2011). *Causes and Consequences of Firm Disclosures of Anticorruption Efforts*.
- Hess, D. (2009). Catalyzing Corporate Commitment to Combating Corruption. *Journal of Business Ethics*, 88(S4), 781–790. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0322-7>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Diunduh: 14 Agustus 2024. <https://web.iaiglobal.or.id>.
- Jefkins, F. (1983). *Public relations for marketing management*. Springer.
- Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Avelind Noyem, J., & Darus, F. (2016). A comparative study of anti-corruption practice disclosure among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) best practice companies. *Journal of Cleaner Production*, 112, 2896–2906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091>
- Karim, N. K., Animah, A., & Sasanti, E. E. (2017). Pengungkapan Anti Korupsi dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar Di Indeks Sri Kehati. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2), 28. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v15i2.5>
- Khamainy, A. H., & Laras Asih, D. N. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Pengungkapan Anti Korupsi sebagai Variabel Moderasi. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i2.393>
- Khasanah, P., & Kusuma, I. (2020). Anti-Corruption Disclosure And Earnings Management: A Case in Indonesian Capital Market. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.06>
- Kurniawan, S. (2023, 3 Mei). Kasus Waskita Karya Akibat Beban Berat Penugasan Infrastruktur dan Besar Celah Korupsi. Diakses 14 Agustus 2025, dari https://www.tempo.co/arsip/kasus-waskita-karya-akibat-beban-berat-penugasan-infrastruktur-dan-besar-celah-korupsi--191833#goog_rewarded.
- Medistiara, Y. (2022, 31 Mei). Kejaksaan Tetapkan 6 Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Impor Baja. Diakses 14 Agustus 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-6104139/kejaung-tetapkan-6-tersangka-korporasi-kasus-korupsi-impor-baja>.
- Ogunode, O. A. (2022). Legitimacy theory and environmental accounting reporting and practice: A review. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 13(1). <https://doi.org/10.9734/SAJSSE/2022/v13i130345>.
- O'Brien, M., Hill, D. J., & Autry, C. W. (2009). Customer behavioral legitimacy in retail returns episodes: effects on retail salesperson role conflict. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 17(3), 251-266.
- Osuji, O. (2011). Fluidity of Regulation-CSR Nexus: The Multinational Corporate Corruption Example. *Journal of Business Ethics*, 103(1), 31–57. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41476010>
- Perwitasari, D. (2014). Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan, dan Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5032>
- Ratu, D. M., & Rahajeng, D. K. (2024). Anti-corruption policy and earnings management: do women in monitoring roles matter? *Asian Journal of Accounting Research*, 9(4), 340–357. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0327>
- Salem, R. I. A., Ghazwani, M., Gerged, A. M., & Whittington, M. (2023). Anti-corruption disclosure quality and earnings management in the United Kingdom: the role of audit quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, 31(3), 528-563. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2023-0035>

- Sarhan, A. A., Elmagrhi, M. H., & Elkhashen, E. M. (2024). Corruption prevention practices and tax avoidance: the moderating effect of corporate board characteristics. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 55, 100615.
- Schipper, K. (1989). Earnings Management. *Accounting horizons*, 3(4), 91.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202011>
- Transparency International. (2019). Corruption Preceptions Indeks. Diunduh 4 Agustus 2020, <https://www.transparency.org>
- Yip, E., C. Van Staden, and S. Cahan. (2011). Corporate Social Responsibility Reporting and Earnings Management: The Role of Political Costs. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 5(3), 17-34.
- Watts, R.L., and J.L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ.